

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga adanya tuntutan globalisasi di bidang pendidikan yang memacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju.<sup>1</sup>

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu negara

---

<sup>1</sup> Kunandar, *Guru Profesional Dalam Implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 131

yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan.

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis bukan hanya dapat menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga harus memikul tanggung jawab secara bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Sesungguhnya kehidupan yang demokratis adalah cita-cita yang dicerminkan dan diminatkan oleh para pendiri bangsa dan negara ketika mereka pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, begitu juga dengan pemilihan umum dan demokrasi keduanya tidak dapat dipisahkan, jika ada pemilihan umum berarti disitu ada demokrasi. Pemilu sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), hlm. 181

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat (1) pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pemilihan umum warga negara memiliki peran yang sangat penting, karena sukses atau tidaknya sebuah pemilu akan diukur dari sebatas mana partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut, baik itu pemilihan umum legislatif, presiden, maupun kepala daerah.

Pelaksanaan pemilihan umum tersebut selalu terdapat pemilih pemula. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Para pemilih pemula yang kebanyakan dari siswa-siswi Sekolah Menengah Atas yang baru memasuki usia hak pilih pasti belum memiliki jangkauan politik yang luas kondisi masih belum stabil, mudah dipengaruhi oleh orang lain, sehingga apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang diharapkan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Basuki Rachmat dan Ester, "Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Politik* Volume XLII, Nomor 2 (2016): hlm. 25

Pemilih pemula mempunyai peran yang dapat diperhitungkan dalam pemilihan umum karena suaranya setengah bagian dari jumlah keseluruhan pemungutan suara. Adapun jumlah pemilih pemula pada pilkada Provinsi Jambi tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**

**Jumlah Pemilih Pemula Pada Pilkada Provinsi Jambi Tahun 2020**

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih Pemula
1	Kerinci	10.661
2	Merangin	25.702
3	Sarolangun	5.384
4	Batanghari	1.976
5	Muaro Jambi	31.989
6	Tanjung Jabung Barat	10.003
7	Tanjung Jabung Timur	7.397
8	Bungo	6.862
9	Tebo	2.907
10	Kota Jambi	2.063
11	Kota Sungai Penuh	3.101
	<b>Total</b>	<b>108.045</b>

*Sumber : KPU Provinsi Jambi (2020)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pemilih pemula pada pilkada tahun 2020 di Kota Jambi adalah sebanyak 2.063 pemilih. Namun pada umumnya, keterlibatan pemilih pemula ini sering menimbulkan permasalahan diantaranya adalah partisipasi mereka yang rendah karena masih banyak pemilih pemula yang belum menggunakan hak pilihnya dan belum terlibat aktif dalam kegiatan pemilu walaupun ini pengalaman pertama mereka dengan alasan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang politik.

Pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Pendidikan politik mendidik siswa agar mereka melek politik, artinya siswa diharapkan sadar politik selaku generasi penerus bangsa.<sup>4</sup> Maka dapat dikatakan bahwa selain keluarga sarana sosialisasi politik yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi sikap atau orientasi politik pemilih pemula adalah sekolah.

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan-pendidikan khusus yang tidak diperoleh dalam keluarga. Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak mengenai pentingnya hidup bernegara, rasa cinta tanah air dan rasa setia kepada negara, juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu kebangsaan. Sekolah juga

---

<sup>4</sup> Irlan Haerul, "Peran Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Siswa Kelas X Di MA Al-Mutmainnah," *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* Volume 9, Nomor 1 (2019): hlm. 3

mengajarkan pandangan yang lebih nyata tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana siswa diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah.

Pendidikan politik di sekolah diharapkan dapat mencerdaskan, meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotism siswa terhadap kegiatan kenegaraan, baik itu dalam hal administrasi negara, sistem negara, dan hal-hal yang menyangkut kenegaraan. Sehingga pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dapat meningkat, menjadi siswa insan politik yang jujur dan bertanggung jawab baik itu dilingkungan sekolah maupun di masyarakat pada umumnya.

Pentingnya sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi politik, karena sekolah dapat menjelaskan sistem politik dan dapat memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan ekspresif terhadap suatu sistem itu, seperti bendera nasional. Pegangan sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan terhadap sistem politik.<sup>5</sup>

Di sekolah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.

---

<sup>5</sup> Putri Pratiwi, "Peran Sekolah Dalam Sosialisasi Politik Siswa di Sma Negeri 1 Purwodadi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2015): hlm. 3

Dengan pendidikan politik yang benar dan rasional melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa akan dapat membiasakan membahas tema-tema tentang politik, baik politik nasional maupun politik lokal seperti pemilihan Walikota Jambi dan Pemilihan Gubernur Jambi. Guru harus memfasilitasi kegiatan siswa untuk diskusi, bermain peran, mendemonstrasikan pelaksanaan pemilu, debat politik dan sebagainya agar pembelajaran menjadi menarik, kreatif, inovatif dan menyenangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sma Negeri 1 Kota Jambi dan Sma Negeri 5 Kota Jambi sebagai salah satu agen sosialisasi politik memiliki andil yang besar dalam pendidikan politik pemilih pemula yang diharapkan dapat mendidikan siswa menjadi warga negara yang baik, dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas dan rasional. Semenjak kelas X sampai kelas XII mereka sudah mendapatkan pembelajaran politik bagi pemula melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai pengalaman pada penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai salah satu sumber pendidikan politik akan memberikan warna dan akan membentuk perilaku politik siswa sesuai dengan pembelajaran politik.

Pembelajaran politik interaktif di kelas sangat beragam seperti diskusi, debat, maupun mendemonstrasikan kelompok kepentingan, kelompok penekan, kampanye dan mendemonstrasikan pemilihan kepala daerah. Dengan bimbingan guru sebagai salah satu sumber belajar serta

mengambil sumber dari media (televise dan media massa) dan politik yang berkembang di masyarakat dan kenyataan yang dilihat di masyarakat, siswa dapat mempresentasikan kebolehannya sebagai pelaku politik, pemilih pemula maupun sebagai partisipan sesuai dengan kajian materi masing-masing dalam pembelajaran di kelas.

Guru sebagai sarana pencapaian target kurikulum yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan sebelumnya dengan standar pada kompetensi, kompetensi dasar dan indikator sebagai alat ukur pencapaian. Pada umumnya guru bersikap sebagai intelektual organis, bagian birokrasi dan warga negara, maka guru berperan sebagai media untuk kepentingan rezim. Akan tetapi jika guru berperan sebagai agen maka dia akan bertindak sebagai pengembang kurikulum, berdasarkan ruang dan waktu yang tersedia akan memodifikasi kurikulum. Biasanya guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada *civil society*, kreatif dalam mengembangkan kurikulum, sehingga pendidikan politik bertujuan untuk pembangunan nasional.

Padahal untuk memperkokoh tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih atas kaum remaja untuk pendidikan politik menjadi kian penting. Demokrasi akan digoyang terus oleh kepentingan kekuasaan, dinasti politik, familisme, ideologisme dan segala macam kepentingan kaum tua lainnya. Demokrasi diisi dengan segala macam potret palsu tentang perhatian kepada rakyat, ketika kaum remaja sebagai generasi pengganti tidak diikutsertakan dalam mencerna dunia dan masalah-masalahnya.



Untuk itu pendidikan politik yang pada saatnya mempengaruhi perilaku politik para siswa sebagai pemula yang berdasarkan kepentingan kaum remaja sendiri sangat dibutuhkan dan diperlukan, terutama untuk mencegah agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai “pendidikan politik pemilih pemula” yang tidak tahu apa-apa.

Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian.<sup>6</sup> Budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam budayanya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.<sup>7</sup>

Pendidikan politik bagi remaja sangat penting sebagai upaya untuk pengembangan budaya politik. Pendidikan politik remaja perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga remaja diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Sistem sosial menjaga stabilitas dan mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan proses sosialisasi yang intensif ketika nilai-nilai yang menopang sistem dipegang kaum tua. Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkatkan dan akan terwujud dalam sikap dan tingksh laku sehari-hari

---

<sup>6</sup> J. W. Batawi, “Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada,” *Jurnal UNI ERA* Volume 2, Nomor 2 (2013): hlm. 30

<sup>7</sup> Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture* (Princeton: Princeton University Press, 1963)

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang leluhur dari bangsanya dan sadar akan hak dan kewajibannya didalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pendidikan politik bertujuan untuk mewujudkan atau menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa.<sup>8</sup> Orang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peran mereka didalamnya.

Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap aturan permainan politik (*Rule Of The Political Game*) yang tidak tertulis, seperti sekoah-sekolah negeri di Inggris yang secara

---

<sup>8</sup> Irmasugiati, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2014 Di Kelurahan Leoran Kabupaten Enrekang,” *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* Volume 5, Nomor 1 (2017): hlm. 16

tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal dan integritas politik.<sup>9</sup>

Sosialisasi politik melalui sekolah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agen sosialisasi politik lainnya. Melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan siswa dapat menerima sosialisasi politik secara langsung, karena kompetensi dasar mata pelajaran tersebut memuat kompetensi dasar mayoritas pembelajaran politik.<sup>10</sup>

Sekolah memegang peran penting dalam proses sosialisasi politik peserta didik, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam perilaku politiknya setelah masuk sekolah dan melakukan komunikasi, interaksi terhadap lingkungan warga sekolah yang memungkinkan menambah pengalaman siswa dalam menghadapi masalah pribadinya dan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa jalur pendidikan sekolah/formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang (pasal 1 ayat 10). Peran sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya.

---

<sup>9</sup> Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 38

<sup>10</sup> Sihabudin Zuhri, Tesis: "*Peranan Sekolah Dalam Proses Sosialisasi Politik (Studi Penelitian Terhadap Siswa SMA Negeri 2 Semarang)*" (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010), hlm. 10

Sekolah mempunyai peranan yang penting dan fundamental di dalam proses sosialisasi politik pada peserta didik, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial yaitu makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik didalam masyarakat, menjadi warga negara yang baik serta mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebab bagaimanapun pada akhirnya para peserta didik akan hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat.

Alasan penulis memilih SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi, karena menurut pengamatan penulis sekolah tersebut merupakan sekolah terfavorit di Kota Jambi dibandingkan dengan SMA lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui peran sekolah menengah atas sebagai sarana pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik dikalangan pemilih pemula, khususnya di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Putri Pratiwi dengan judul “Peran Sekolah Dalam Sosialisasi Politik Siswa Di SMA Negeri 1 Purwodadi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi politik di SMA Negeri 1 Purwodadi yaitu melalui kegiatan intrakurikuler yang dilakukan didalam kelas berdasarkan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan masalah politik. Selain melalui kegiatan intrakurikuler juga dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan diluar kelas

seperti OSIS dan Pramuka, dengan metode ceramah, diskusi dan simulasi.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama ingin membahas peran Sekolah Menengah Atas sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik dikalangan pemilih pemula. Perbedaannya adalah penelitian ini pada kalangan pemilih pemula Kota Jambi yaitu SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi, sedangkan penelitian terdahulu adalah Siswa SMA Negeri 1 Purwodadi.

Penelitian Rayi Mutia A, dengan judul “Peran Sekolah Dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa Di Sekolah Menengah Atas Islam Hidayatullah Semarang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di sekolah yang berbasis keagamaan seperti SMA Islam Hidayatullah Semarang lebih banyak dilakukan dengan cara pembinaan karakter/akhlak yang didukung dengan pengayaan praktik beragama seperti sholat berjamaah, dzikir bersama, mentoring, dan mengaji. Pembentukan karakter ini berguna apabila kelak mereka menjadi pemimpin ataupun dalam bermasyarakat dapat menjadi orang dengan karakter yang baik, santun, dan amanah. Muatan pendidikan politik diantaranya terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Sosiologi, Sejarah, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama Islam. Selain itu, pendidikan politik juga dapat dipelajari dalam kegiatan

---

<sup>11</sup> Putri Pratiwi, *op.cit*, hlm. 7

ekstrakurikuler dan intrakurikuler sebagai sarana praktis mengasah bakat kepemimpinan dan rasa tanggung jawab siswa.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sama sama ingin membahas peran sekolah dalam pendidikan politik. Perbedaannya adalah penelitian ini memilih pemula di SMA terfavorit di Kota Jambi sedangkan penelitian terdahulu adalah siswa SMA Yang berbasis Keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Sekolah Menengah Atas Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kalangan Pemilih Pemula Kota Jambi Tahun 2024 (Studi Kasus SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Sekolah Menengah Atas Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Kalangan Pemilih Pemula Kota Jambi Tahun 2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Sekolah Menengah Atas sebagai sarana sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula Kota Jambi Tahun 2024

---

<sup>12</sup> Rayi Aik Mutia, “Peran Sekolah Dalam Pendidikan Politik Bagi Siswa Di Sekolah Menengah Atas Islam Hidayatullah Semarang,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2015): hlm. 12

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang kami paparkan dengan gambaran penelitian yang akan dikaji, maka diharapkan juga agar dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan diantaranya:

1. Secara teoris

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Politik, bagi Pendidikan Kewarganegaraan terutama sosialisasi politik di sekolah yang merupakan salah satu sarana agen perubahan dan sebagai salah satu kajian politik dan pemerintahan, terutama berkaitan dengan sosialisasi politik dan partisipasi politik.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintahan maupun partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik khususnya para siswa SLTA sehingga perilaku politik dari para siswa didasarkan pada pendidikan politik yang cerdas, rasional, dan tidak menyesatkan.

## 1.5 Landasan Teori

### 1.5.1 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses yang sulit dipahami. Secara luas dikatakan sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu.<sup>13</sup> Masyarakat politik membawakan pola-pola yang telah terpolakan dari pemikiran, tindakan, hukum dan norma serta tradisi melalui agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, sistem pendidikan, kelompok bermain, organisasi masyarakat, media, lembaga politik, dan organisasi keagamaan serta militer.<sup>14</sup>

Sosialisasi politik pada dasarnya merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Beberapa ahli ilmu sosial menggunakan istilah sosialisasi untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa.

Sosialisasi politik menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak sejak kanak-kanaknya belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>13</sup> Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *op.cit.*

<sup>14</sup> Virginia Sapiro, "Not Your Parents' Political Socialization, Introduction For A New Generation," *Annual Review Of Political Science* Volume 7 (2004): hlm. 2



Jadi sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Disamping itu, sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu negerasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan politik pada generasi sesudahnya, proses ini disebut transmisi kebudayaan.<sup>15</sup>

Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik, yaitu pertama sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat, sementara ia menjalani berbagai pengalaman sosial. Pengaruh keluarga selama masa kanak-kanak, misalnya akan menciptakan gambaran yang mengenai suatu partai politik tertentu dalam pemikiran seseorang. Tetapi pendidikan di sekollah, pengalaman kerja dan pengaruh pergaulan mungkin saja merubah gambaran itu dengan dramatis.

Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi yang bersifat langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara terang-terangan, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas adalah sebuah contoh model sosialisasi politik secara langsung, seperti halnya usaha-usaha partai komunis untuk menciptakan orang soviet. Sosialisasi politik tidak langsung terutama sangat kuat berlangsung di

---

<sup>15</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit*, hlm. 34

masa kanak-kanak sejalan dengan berkembangnya sikap penurut atau sikap pembangkang terhadap orang tua, guru, teman-teman dan lain-lain.

Sosialisasi politik membentuk dan mewariskan kebudayaan politik suatu bangsa. Sosialisasi politik juga dapat memelihara kebudayaan politik suatu bangsa dalam pewarisan kebudayaan itu oleh suatu generasi kepada generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga dapat merubah kebudayaan politik, yaitu apabila sosialisasi itu menyebabkan penduduk atau sebagian penduduk melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain.<sup>16</sup>

Dengan melihat konsep sosialisasi politik tersebut di atas dan secara efektif mengetengahkan beberapa segi pentingnya sosialisasi politik

1. Sosialisasi politik secara fundamental merupakan hasil proses belajar, pengalaman dan atau sebagai pola-pola aksi.
2. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif atau nilai-nilai dan sikap-sikap.
3. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi dari usia kanak-kanak sampai masa remaja saja, akan tetapi sosialisasi itu tetap berlanjut sepanjang kehidupan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

Ada 3 mekanisme sosialisasi politik pada masa kanak-kanak akan tetapi tidak ada alasan untuk tidak menerapkan pada seluruh proses sosialisasi yaitu:<sup>17</sup>

1. Imitasi

Imitasi merupakan peniruan (*Copy*) terhadap tingkah laku individu-individu lain dan merupakan hal yang sangat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak, walaupun sebenarnya dibatasi pada tingkah laku kanak-kanak saja. Namun demikian imitasi murni lebih banyak terdapat di kalangan anak-anak. Pada masa remaja dan pada orang dewasa imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula baik intruksi maupun motivasi.

2. Instruksi

Instruksi mengacu pada proses sosialisasi pembelajaran baik secara formal (sekolah), informal (keluarga), maupun dalam bentuk nonformal (kelompok, organisasi, media masa, dan lain-lain).

3. Motivasi

Motivasi merupakan mekanisme proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang secara langsung mendorong dirinya untuk belajar dari pengalaman-

---

<sup>17</sup> Muhammad Teguh Wibowo dan Effendi Hasan, "Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 2, Nomor 2 (2017): hlm. 541

pengalamannya mengenai tindakan-tindakan yang sesuai dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.

Sosialisasi politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi satu ke generasi kemudian.<sup>18</sup> Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empiric, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi ditempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkatkan dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat termasuk hidup kenegaraan dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing.<sup>19</sup> Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa dapat berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang leluhur dan

---

<sup>18</sup> J. W. Batawi, *op.cit*,

<sup>19</sup> Vintan Trisasti Putri dan Sri Sedar Marhaeni, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik (Studi Kasus Pemilihan Bupati Banyuwangi 2020 Di Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi)," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 6, Nomor 2 (2021): hlm. 82

bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebijakan dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial.

Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara untuk ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi keberlangsungan demokrasi. Dan sebaliknya harus menghindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi.<sup>20</sup>

Dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan suatu proses dialog antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma

---

<sup>20</sup> Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 117

dan simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik seperti sekolah, pemerintah, partai politik dengan peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik.

b. Indoktrinasi Politik

Indoktrinasi Politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik.

Sosialisasi politik ialah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi politik merupakan suatu proses pendidikan atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini dimana keluarga berperan penting sebagai pelaku utama dalam sosialisasi.

Ada dua tipe sosialisasi politik yaitu secara langsung dan tidak langsung:<sup>22</sup>

a. Sosialisasi Politik Langsung

Sosialisasi politik langsung berlangsung satu tahap saja yaitu bahwa hal-hal yang diorientasikan dan ditransmisikan adalah hal-hal yang bersifat politik saja.

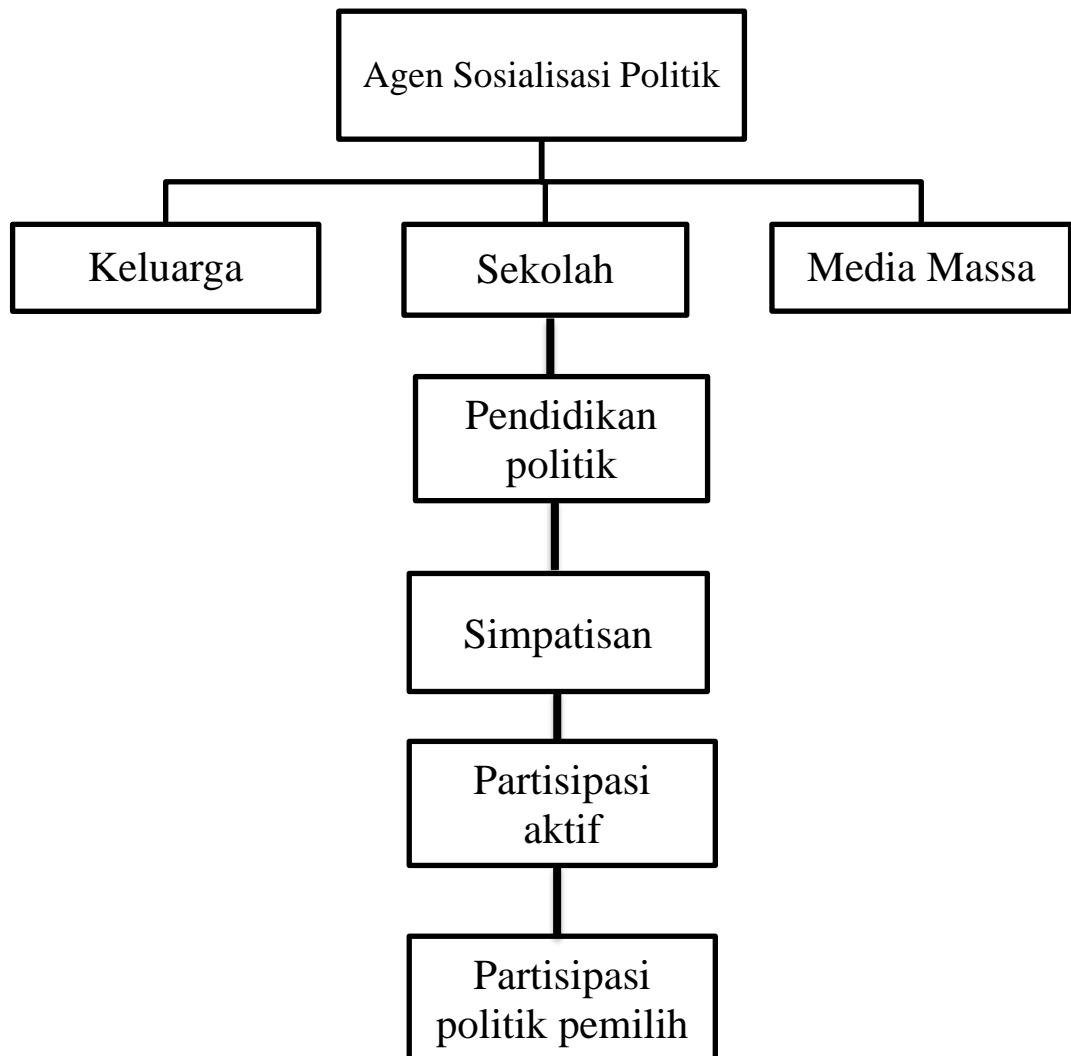
b. Sosialisasi Politik Tidak Langsung

Sosialisasi politik tidak langsung adalah warga negara pada mulanya berorientasi pada hal-hal yang bukan politik namun kemudian, mempengaruhinya untuk memiliki orientasi politik.

---

<sup>22</sup> Ijwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Angkasa, 1995), hlm. 15

## 1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Pentingnya sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi politik, karena sekolah dapat menjelaskan sistem politik dan dapat memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan ekspresif terhadap suatu sistem itu. Pemilih pemula merupakan periode penting karena



akibatnya yang langsung berdampak terhadap sikap dan perilaku. Pada usia pemilih pemula, seorang individu juga mulai menyerap berbagai informasi. Oleh karena itu, siswa lebih mudah untuk diarahkan pada konsep-konsep positif yaitu konsep keilmuan.<sup>23</sup>

Konsep keilmuan yang diserap termasuk juga di dalamnya berbagai konsep politik. Hal ini menjadi penting agar siswa tidak buta terhadap politik dan hanya menjadi sasaran pembodohan politik, karena siswa yang dikatakan pemilih pemula memiliki kedudukan strategis dalam setiap pelaksanaan politik praktis yaitu pemilihan umum. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat, dan sebaliknya bahwa lembaga-lembaga dan proses politik berdampak besar pada karakteristik pendidikan negara.

Pendidikan politik merupakan kegiatan belajar yang intens dan sistematis untuk mengarahkan individu pada proses belajar berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pendidikan politik sebagai upaya yang disengaja untuk memengaruhi individu agar lebih aktif dalam perjuangan politik dan memiliki tanggung jawab etis yang tinggi dalam kegiatan politiknya,<sup>24</sup> sehingga menarik simpatisan yang diharapkan dapat terbentuknya partisipasi aktif individu yang memiliki tanggungjawab, moral dan etika demi tercapainya tujuan dari suatu negara. Pendidikan politik yang diberikan juga harus menekankan pentingnya partisipasi politik

---

<sup>23</sup> Asmika Rahman dan Suharno, "Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 4, Nomor 2 (2019): hlm. 283

<sup>24</sup> Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)* (Yogyakarta: Ombak, 2019)

masyarakat dan kedudukan pemilih pemula didalam penyelenggaraab negara. Dengan pendidikan politik yang baik dan efektif, diharapkan tingkat partisipasi politik pemilih pemula juga ikut meningkat.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dan akurat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain. Secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif karena menjelaskan penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengetahui fenomena dan gejala sosial yang ada disaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sekolah menengah atas sebagai sarana sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi politik dikalangan pemilih pemula Kota Jambi tahun 2024.

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti akan melaksanakan proses penelitian yang akan berlangsung

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6

sehingga diperlukan seorang informan yang memungkinkan untuk bisa membantu peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, peneliti melaksanakan penelitiannya di Kota Jambi terhadap elemen masyarakat guna untuk membantu agar terlaksananya penelitian dengan lancar.

Oleh karena itu lokasi penelitian yang akan penulis teliti adalah pemilih pemula di Kota Jambi, diantaranya di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi.

#### 1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah peran sekolah menengah atas sebagai sarana sosialisasi politik dalam meningkatkan partisipasi dikalng pemilih pemula.

#### 1.7.4 Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang akurat. Sumber data primer penelitian ini adalah informan dalam penelitian.

##### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Data sekunder bersumber dari

buku-buku, catatan guru dan literature dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah di publikasikan.

#### 1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan)<sup>26</sup>. Teknik penentuan informan yang digunakan ialah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota jambi
- b. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi

#### 1.7.6 Teknik Pengumpulan data

Instrument penelitian atau alat bantu dalam pelaksanaan penelitian yang dibutuhkan guna membantu mengumpulkan data. Pengumpulan data ini dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan pembuktian. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap variabel supaya mendapat informasi yang valid, terpercaya, dan juga relevan. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan terhadap informan yang menjadi kajian dari sebuah unit masyarakat dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, R&D Dan Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm.211

Dimana unit ini merupakan pemilih pemula Kota Jambi khususnya di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan SMA Negeri 5 Kota Jambi. Adapun tahapan pengumpulannya adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Proses observasi ini merupakan sebuah kegiatan peneliti untuk mengenali lapangan penelitian yang akan dilakukan, pengenalan lapangan penelitian diperlukan guna untuk menentukan penelitian seperti apa yang akan dilaksanakan serta bagaimana kondisi lapangan yang nanti akan dijadikan sebuah objek penelitian, baik berupa tempat maupun kondisi masyarakat yang akan diteliti. Dalam teknik penelitian kualitatif data tidak akan diperoleh dengan cara melakukan eksperimen, tetapi peneliti harus terjun ke lapangan secara langsung, baik itu terhadap sekelompok organisasi atau komunitas maupun individu, dimana nantinya data yang akan diperoleh berupa sebuah gambar mengenai sikap seseorang atau perilaku tertentu, serta tindakan atau interaksi antara manusia.

observasi adalah proses pengumpulan informasi open ended (terbuka) dengan mengamati seseorang atau kelompok tertentu dari sebuah masyarakat yang mendiami sebuah wilayah dan tempat tertentu. Dalam hal ini ada beberapa peran observer dalam penelitian diantaranya: peran Observasional, peran pengamat partisipan (*participant observer*), peran pengamat non

partisipan (*non participant observer*).<sup>27</sup> Dimana penulis disini memiliki peran keduanya sehingga data yang diperoleh akan lebih relevan terhadap yang dianalisis. Sebagai peran seorang observan adalah mengetahui tempat wilayah yang akan diteliti dimana wilayah yang diteliti adalah kota jambi.

Sandu Sitooyo dan Ali Sodik berpendapat bahwa dalam mengumpulkan data melalui observasi yang paling efektif adalah peneliti harus melengkapi belangko atau protocol untuk merekam apa saja yang terjadi di lapangan dalam proses pengumpulan data, dimana dalam belangko tersebut berisi berbagai item untuk mendukung penelitian mengenai tingkah laku terhadap objek penelitian.<sup>28</sup>

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses interaksi antar seseorang yang menanyakan tentang sebuah masalah terhadap informan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terhadap suatu kegiatan tertentu. Esterberg menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab” ia mengungkapkan bahwa wawancara atau interview merupakan hatinya penelitian sosial, karena menurutnya jika kita melihat

---

<sup>27</sup> John Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (New York: Pearson, 2015), hlm. 245

<sup>28</sup> Sandu Sitooyo, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77

semua penelitian sosial hamper semua menggunakan wawancara sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan data.<sup>29</sup>

Wawancara kualitatif (*qualitative interview*), menurut John Craswell dalam hal wawancara penelitian bisa menanyakan langsung serta berhadapan dengan narasumber atau informan yang akan memberikan informasi untuk penelitian (*face to face interview*/berhadap-hadapan), bisa juga melalui media elektronik, bisa juga mewawancarai informan yang berada dalam sebuah kelompok tertentu.<sup>30</sup>

Wawancara mempunyai beberapa macam yang diantaranya: wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan dimana keduanya sudah mengetahui informasi yang akan di dapat, dengan ciri khas bahwa pertanyaan dan jawaban sudah disiapkan oleh peneliti sebagai bahan alternatif. Kedua, wawancara semi struktur yaitu wawancara lebih bebas pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dan yang terakhir wawancara tidak terstruktur, wawancara ini bersifat bebas karena peneliti tidak mempersiapkan secara khusus dalam menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan tersusun dalam pengumpulan datanya.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 233

<sup>30</sup> John Creswell *op.cit.*

### c. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah catatan yang sudah berlalu, dimana dalam hal ini dokumentasi bisa berupa catatan, gambar, atau karya-karya monumental dan seseorang. Dokumentasi merupakan sarana dan alat bantu dalam penelitian dimana dokumentasi ini bisa berupa surat-surat. Dokumen dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi dua yaitu dokumen publik (Koran, makalah, laporan kantor) dan dokumen privat (buku harian/diary, foto, dan surat).

Dokumen juga bisa terdiri atas catatan publik dan pribadi yang didapatkan oleh seorang peneliti tentang tempat, dan partisipan dalam sebuah penelitian dapat termasuk surat kabar, notulen rapat, catatan pribadi, dan surat.<sup>31</sup> Dokumentasi ini membantu para peneliti kualitatif untuk melaksanakan penelitiannya dalam memahami fenomena sentral dan fenomena ini mengenai penggunaan media sosial oleh anak muda Indonesia sebagai sarana literasi politik.

#### 1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>31</sup> John Creswell, *op.cit.* hlm. 246



a. Mereduksi data (*data reduction*)

Reduksi data, dimana proses ini merupakan tahap memilah dan memilih data yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan, dengan cara mencatat secara maksimal, dan perlunya sugers sehingga dapat dilakukan analisis data dalam proses reduksi, peneliti harus bisa merangkum data, memilih hasil yang paling pokok serta memfokuskan hal penting dalam proses perangkuman data. Dalam hal ini peneliti akan memilih data penelitian dari hasil wawancara dan kuisisioner secara keseluruhan, baik mengenai unsur penelitian, objek penelitian, maksud penelitian dan hasil penelitian mengenai peran media masa dalam pendidikan literasi politik di Kota Jambi.

a. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi untuk memberikan kemungkinan kepada peneliti dalam menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan terhadap data yang dihasilkan, dimana penyajian data ini merupakan sebuah rangkaian organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi secara lengkap dimana proses penyusunan melalui pokok dari hasil temuan yang terdapat dalam tahap penyaringan data (reduksi data) sehingga disajikan dengan menggunakan bahasa penelitian yang sistematis dan juga logis agar mudah di pahami. Tujuan data display adalah untuk

memudahkan peneliti dalam memahami dan melaksanakan kerja selanjutnya, baik menganalisis data maupun untuk menemukan hasil penelitian.

b. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*concluding drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan sebuah proses kegiatan penafsiran. Dari hasil penelitian yang diperoleh serta bagaimana cara kita menginterpretasikan data yang kita hasilkan dari penelitian tersebut, dimana simpulan yang dihasilkan bukan berupa hipotesis, melainkan simpulan yang harus diverifikasi selama melaksanakan proses penelitian dari mulai penelitian sampai dengan selesai dimana hasil penelitian harus dipertanggungjawabkan. Fungsi dari verifikasi adalah untuk mencari makna data yang didapat guna untuk mencari persamaan, hubungan dan perbedaan yang kemudian dibandingkan kesesuaian pernyataan dengan makna yang terkandung dengan konsep penelitian tersebut.

#### 1.7.8 Keabsahan dan Triangulasi Data

Triangulasi merupakan suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategi dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi. Dalam penelitian dapat dipergunakan 4 jenis triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi kejujuran peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi dengan sumber data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data dan menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3. Triangulasi dengan metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang di dapat dengan metode

interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

#### 4. Triangulasi dengan teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.